



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 4 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi, maka perlu menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 30);

12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran unit kerja pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi;
  - g. melakukan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
  - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  - c. menerima dan menyimpan TU dari Bendahara Umum Daerah;
  - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
  - e. menolak perintah bayar Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepala Bendahara Pengeluaran secara periodik.

**KELIMA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang:

- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. memeriksa kas secara periodik;
- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

**KEENAM** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 4 Januari 2023

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.

---

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR :188/4 /404.101.2/B/2023  
 TANGGAL : 4 Januari 2023

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NGAWI  
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kedudukan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Nama/NIP	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Honorarium Perbulan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Sekretariat	WIDYA DECKY HARIYONO, ST, MM NIP. 19761201 200312 1 006	1.03.01.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.084.993.909,00	1.735.000,00
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Sekretariat	DEWI SUSANTI NIP. 19860930 201001 2 003	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.000.000,00	810.000,00
			1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	116.000.000,00	
			1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	
			1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000,00	
			1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.000.000,00	
			1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	
			1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.938.351.476,00	
			1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000,00	
			1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.500.000,00	
			1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.000.000,00	
			1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90.000.000,00	
			1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000,00	
			1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	636.235.000,00	
			1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	
			1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169.022.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.140.000,00	
			1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	
			1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	
			1.03.01.2.06.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	
			1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345.913.000,00	
			1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	466.080.000,00	
			1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	
			1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	101.780.000,00	
			1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	164.300.000,00	
			1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	
			1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	996.852.433,00	
			1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	339.999.933,00	
			1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	178.500.000,00	
			1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	476.352.500,00	
			1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	694.635.000,00	
			1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.110.000,00	
			1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	
			1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	15.000.000,00	
			1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.525.000,00	
			1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	526.000.000,00	
2.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Sumber Daya Air	DWI MIYATNO WAHYUDAYANTO, ST,MM NIP.19710527 200604 1 007	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	29.303.818.000,00	2.090.000,00



1	2	3	4	5	6	7
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Sumber Daya	USWATUN CHASANA NIP.19821001 200901 2 011	1.03.02.201	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.107.000.000,00	980.000,00
			1.03.02.201.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	1.104.000.000,00	
			1.03.02.201.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	390.000.000,00	
			1.03.02.201.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	305.000.000,00	
			1.03.02.201.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	308.000.000,00	
			1.03.02.202	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.200.818.000,00	
			1.03.02.202.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	150.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			1.03.02.202.06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	2.566.510.000,00	
			1.03.02.202.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	20.332.314.000,00	
			1.03.02.202.18	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	460.000.000,00	
			1.03.02.202.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.412.594.000,00	
			1.03.02.202.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	214.000.000,00	
			1.03.02.202.25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	65.400.000,00	
3.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Bina Marga	RACHMAT FITRIANTO, ST NIP.19741023 200501 1 008	1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	5.094.400.000,00	3.340.000,00
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Bina Marga	MOCH. ARIEF BACHTIAR NIP.19810813 200312 1 003	1.03.06.201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.094.400.000,00	1.580.000,00
			1.03.06.201.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	4.879.400.000,00	
			1.03.06.201.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	215.000.000,00	
			1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	151.454.770.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			1.03.10.201	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	151.454.770.000,00	
			1.03.10.201.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	250.000.000,00	
			1.03.10.201.03	Pengelolaan Leger Jalan	3.000.000.000,00	
			1.03.10.201.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	475.000.000,00	
			1.03.10.201.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	-	
			1.03.10.201.08	Rekonstruksi Jalan	111.145.468.000,00	
			1.03.10.201.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	16.420.000.000,00	
			1.03.10.201.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	12.937.042.000,00	
			1.03.10.201.16	Penggantian Jembatan	6.366.000.000,00	
			1.03.10.201.17	Pelebaran Jembatan	461.760.000,00	
			1.03.10.201.18	Rehabilitasi Jembatan	199.500.000,00	
			1.03.10.201.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000,00	
4.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi	YESI WIDYARTI, ST,MM NIP.19790324 200604 2 008	1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	27.481.260.000,00	2.090.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi	RIZKA DWIJA KURNIAWAN, ST. NIP.19771128 201001 1 003	1.03.08.201	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	27.481.260.000,00	980.000,00
			1.03.08.201.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	200.000.000,00	
			1.03.08.201.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4.400.000.000,00	
			1.03.08.201.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000,00	
			1.03.08.201.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			1.03.08.201.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	
			1.03.08.201.09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	20.000.000,00	
			1.03.08.201.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	20.000.000,00	
			1.03.08.201.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	22.756.260.000,00	
			1.03.08.201.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	-	
			1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	7.915.000.000,00	
			1.03.09.201	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	7.915.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			1.03.09.201.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
			1.03.09.201.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	7.665.000.000,00	
			1.03.09.201.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	50.000.000,00	
			1.03.09.201.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	150.000.000,00	
			1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	580.000.000,00	
			1.03.11.201	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	510.000.000,00	
			1.03.11.201.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	190.000.000,00	
			1.03.11.201.05	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	25.000.000,00	
			1.03.11.201.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	100.000.000,00	
			1.03.11.201.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	195.000.000,00	
			1.03.11.202	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			1.03.11.202.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	20.000.000,00	
			1.03.11.202.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	50.000.000,00	
5.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Bidang Penataan ruang	WAHYUDHI PURUHITA, ST.MT NIP. 19770520 200212 1 008	1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.780.000.000,00	1.080.000,00
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Bidang Penataan Ruang	TANTI SULISTYAWATI, A.Md NIP.19780914 201101 2 008	1.03.12.201	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	655.000.000,00	500.000,00
			1.03.12.201.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
			1.03.12.201.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
			1.03.12.201.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			1.03.12.201.04	Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	355.000.000,00	
			1.03.12.202	Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	650.000.000,00	
			1.03.12.202.02	Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	650.000.000,00	
			1.03.12.203	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	
			1.03.12.203.03	Sistem Informasi Penataan Ruang	75.000.000,00	
			1.03.12.204	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	
			1.03.12.204.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	100.000.000,00	
			1.03.12.204.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	300.000.000,00	

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**ONY ANWAR HARSONO**